

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya ini, keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat menjadi komponen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Menurut Arnstein (1996), partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik atau keterlibatan formal, melainkan partisipasi bermakna yang mencakup kontribusi ide, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat berkontribusi terhadap efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan karena program yang dilaksanakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Di tingkat desa, partisipasi masyarakat bahkan memiliki makna yang lebih signifikan. Masyarakat desa merupakan pihak yang paling memahami konteks sosial, budaya, ekonomi, serta permasalahan yang dihadapi di wilayahnya. Oleh karena itu, memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat tidak hanya memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*), tetapi juga merupakan bentuk nyata pemberdayaan masyarakat. Partisipasi juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek dari kebijakan dan program pembangunan, tetapi turut menjadi subjek dan penggerak utama dalam perubahan sosial yang berkelanjutan (Putri & Yuniningsih, 2019; Suparjan & Hadi, 2019).

Namun demikian, partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya. Terdapat sejumlah faktor penghambat partisipasi, salah satunya adalah keterbatasan informasi. Informasi yang tidak merata, tidak tepat sasaran, atau sulit diakses seringkali menyebabkan masyarakat tidak memahami program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa maupun lembaga terkait. Menurut Septian et al. (2024), akses terhadap informasi yang akurat, mudah dipahami, dan terbuka menjadi salah satu syarat utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ketimpangan informasi inilah yang kemudian menjadi salah satu akar dari rendahnya partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh

infrastruktur komunikasi dan teknologi. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggagas pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu strategi untuk memperluas dan mempercepat akses informasi masyarakat, khususnya di desa-desa. KIM merupakan wadah partisipatif yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong peningkatan kapasitas literasi digital masyarakat. KIM dibentuk tidak hanya sebagai pelengkap media informasi desa, tetapi sebagai penggerak sosial yang dapat membentuk opini publik, mengedukasi masyarakat, serta mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan yang berasal dari bawah (bottom-up).

Di era transformasi digital saat ini, peran KIM menjadi semakin penting. KIM bukan hanya bertugas menyebarkan informasi secara satu arah, tetapi juga membangun interaksi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyuarakan aspirasi, masukan, bahkan kritik terhadap kebijakan desa. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, peran ini sangat strategis karena dapat menciptakan ruang komunikasi yang sehat dan transparan antara warga dan pemerintah desa. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial, website, dan platform digital lainnya, KIM mampu menjangkau masyarakat lebih luas dengan cara yang lebih cepat dan efektif. Salah satu contoh nyata keberhasilan implementasi KIM dapat ditemukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang membentuk KIM Tirto Gunitir pada Maret 2023. KIM ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa dan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta pemuda lokal. Struktur keanggotaan yang plural ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak pembentukannya, KIM Tirto Gunitir telah berperan aktif dalam mendukung berbagai aspek pembangunan desa. Salah satu inisiatif unggulan adalah pendirian Galeri Gunitir, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat oleh-

oleh dan informasi pariwisata, tetapi juga sebagai ruang klinik UMKM yang membantu pelaku usaha desa meningkatkan kualitas produk mereka – mulai dari desain kemasan, strategi pemasaran, hingga akses ke pameran atau event luar desa. Selain itu, KIM juga aktif dalam menyebarluaskan informasi desa melalui berbagai platform digital dan media sosial, meningkatkan literasi digital warga, serta mengorganisir partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya seperti festival desa dan pawai budaya tahunan. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa KIM Tirta Gumitir tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan masyarakat berbasis informasi dan teknologi. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh KIM dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Strategi ini mencakup metode penyebaran informasi, pendekatan kolaboratif lintas sektor, edukasi masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan KIM itu sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi yang diterapkan oleh KIM Tirta Gumitir dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat, serta menilai sejauh mana strategi tersebut mampu memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis lokal. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat menjadi lebih signifikan karena mereka adalah pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi, baik secara fisik, finansial, maupun melalui gagasan, proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Suparjan & Hadi, 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat menjadi sarana pemberdayaan, di mana mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang memiliki peran aktif. Namun, untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat yang optimal, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang faktor Penghambat partisipasi masyarakat. (Septian et al., 2024)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah implementasi program dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkolaborasi dengan berbagai desa dengan tujuan mengoptimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kelompok informasi masyarakat (KIM) merupakan wadah atau kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat akses, pemanfaatan, dan penyebaran informasi di tingkat masyarakat. KIM diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menggunakan informasi, yang pada gilirannya akan mendukung pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Di era digital ini, akses terhadap informasi menjadi hal yang sangat penting. Pada dasarnya, keberadaan KIM di desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Ketidakmerataan akses terhadap informasi sering menjadi kendala dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, dengan adanya KIM, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup dan mempercepat proses pembangunan desa. Selain itu, KIM juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan pembangunan yang ada di desa.

Kelompok informasi masyarakat muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Kelompok ini berfungsi untuk mempercepat proses penyebaran informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam komunitas ini, anggota dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang mereka miliki, serta bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Peran KIM di desa semakin penting seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai informasi, tetapi juga mempercepat penyebaran informasi yang relevan dan akurat. Melalui berbagai platform, seperti radio komunitas, media sosial, dan internet, KIM desa dapat memberikan informasi yang tidak hanya terbatas pada isu lokal, tetapi juga informasi global yang dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Dengan informasi yang lebih terbuka dan dapat diakses dengan mudah, masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya, mengambil keputusan yang lebih baik, serta berkontribusi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Dengan adanya KIM, diharapkan informasi yang sebelumnya terbatas

dan tidak merata dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, edukatif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di desa merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, serta memberdayakan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Menurut Masyarakat Informasi Indonesia (2018), keberadaan KIM di desa tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk berbagai keperluan, seperti akses pasar untuk produk lokal, edukasi tentang kesehatan, hingga pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan. Oleh karena itu, KIM di desa juga berperan sebagai lembaga yang dapat mengedukasi masyarakat untuk menjadi lebih melek teknologi dan lebih siap dalam menghadapi tantangan global. Lebih jauh lagi, KIM di desa dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. KIM menjadi jembatan yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pihak pemerintah dan masyarakat desa. Hal ini sangat penting agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada pemerintah. Dalam konteks ini, penguatan KIM desa juga menjadi salah satu bagian penting dalam program-program pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital antara desa dan kota. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2019), salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendorong pembentukan KIM di desa-desa, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih informatif, partisipatif, dan mandiri.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan, KIM juga berfungsi sebagai saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. KIM memberi ruang bagi warga desa untuk menyampaikan ide, keluhan, serta aspirasi mereka kepada pemerintah, yang

pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui KIM, masyarakat desa juga dapat mengakses informasi tentang pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program-program peningkatan kapasitas diri yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, KIM juga membantu meningkatkan literasi digital masyarakat, yang semakin menjadi kebutuhan di era teknologi saat ini. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh masyarakat tentang KIM dapat membantu masyarakat desa mengakses pasar yang lebih luas, mempromosikan produk lokal, dan memperkenalkan peluang usaha yang relevan dengan kondisi lokal. Misalnya, melalui platform digital, KIM desa bisa memberikan informasi tentang cara memasarkan produk pertanian secara online.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu desa yang sukses membentuk KIM yang di beri nama KIM Tirto Gunitir, dimana KIM Tirto Gunitir ini dibentuk dan di resmikan pada tahun 2023 awal tepatnya bulan Maret dengan SK yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo. Anggota KIM Tirto Gunitir terdiri dari beberapa unsur masyarakat diantaranya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), BUMDES, Pelaku UMKM, dan juga terdiri dari beberapa pemuda lokal Desa Sidomulyo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dan menjadi fokus penelitian ini yaitu :

Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kelompok informasi Masyarakat (KIM) Tirto Gunitir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin di capai antara lain :

1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok informasi masyarakat (KIM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Kelompok informasi Masyarakat (KIM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa Sidomulyo melalui platform digital seperti media sosial. Manfaat yang didapat oleh masyarakat yaitu informasi mengenai program desa yang jarang diketahui masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi kajian teori-teori yang berkaitan mengenai implementasi kebijakan, khususnya penelitian yang berkaitan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih, literasi, maupun studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya.